

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan hingga kini masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan, tetapi juga berkaitan erat dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak (Suryawati, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 tercatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36%, yang berarti terdapat lebih dari 25 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari jumlah tersebut, sekitar 12,22% adalah penduduk perdesaan yang mengalami keterbatasan secara ekonomi dan sosial (BPS, 2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui program-program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, hasilnya masih belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan.

Kemiskinan di tingkat lokal, khususnya di wilayah pedesaan, sering kali memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan di wilayah

perkotaan. Di pedesaan, kemiskinan tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian tradisional, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (Kuncoro, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di pedesaan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensional, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi semata, melainkan memerlukan intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai sektor pembangunan.

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Keduanya tidak hanya berperan sebagai indikator kesejahteraan, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pendidikan yang memadai memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap peluang kerja yang lebih baik, sementara layanan kesehatan yang berkualitas menjamin produktivitas dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang (Todaro & Smith, 2015).

Di Indonesia, pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan terus diupayakan melalui berbagai program nasional, seperti wajib belajar 12 tahun, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Program Indonesia Sehat. Namun, tantangan masih ditemukan terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan dalam hal sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat

akan pentingnya pendidikan dan kesehatan (Susanti, 2022). Kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan inilah yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas hidup keluarga miskin di perdesaan. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami putus sekolah, dan ibu hamil atau balita dari keluarga miskin sering tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan dan menurunkan indeks pembangunan manusia (IPM) daerah.

Salah satu daerah yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur. Meski secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan di tingkat provinsi, namun Kabupaten Jombang masih memiliki wilayah-wilayah yang menunjukkan indikator kemiskinan yang cukup tinggi, khususnya di beberapa desa. Salah satu desa tersebut adalah Desa Jatirejo di Kecamatan Diwek, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penerima berbagai program bantuan sosial termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) (RTKD Kabupaten Jombang, 2024).

Kabupaten Jombang sendiri, meskipun memiliki capaian IPM yang relatif tinggi di tingkat provinsi, masih memiliki desa-desa dengan capaian pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Desa Jatirejo, salah satu desa di Kecamatan Diwek, menjadi contoh wilayah yang masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi pendidikan anak dari keluarga miskin serta pemanfaatan layanan kesehatan dasar yang belum maksimal (Bappeda Kabupaten Jombang, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya intervensi sosial yang tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga

mendorong perubahan perilaku dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan berbagai program perlindungan sosial. Salah satu program yang dinilai strategis dan berkelanjutan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) yang menyasar keluarga miskin dengan syarat tertentu, terutama terkait komitmen dalam bidang pendidikan dan kesehatan (Kementerian Sosial RI, 2022).

PKH dirancang untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang melalui peningkatan akses dan partisipasi keluarga penerima manfaat (KPM) dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan memberikan bantuan tunai bersyarat, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah, ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan yang layak, serta balita dan lansia menerima perawatan dasar yang memadai (Kementerian Sosial RI, 2022). Skema bantuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berupa bantuan tunai, tetapi perlu disertai dengan upaya penguatan kualitas sumber daya manusia.

Program PKH menjadi prioritas dalam kebijakan nasional perlindungan sosial karena dinilai efektif menjangkau kelompok paling rentan di masyarakat. Hingga tahun 2023, program ini telah menjangkau

lebih dari 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia (TNP2K, 2023). Selain itu, PKH juga berkontribusi dalam peningkatan indikator pembangunan manusia seperti angka partisipasi sekolah dan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah sering kali menghadapi tantangan implementatif yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Sumarto & Bazzi, 2020). Salah satu wilayah yang menjadi lokasi penerapan program ini adalah Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Sebagai wilayah pedesaan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, desa ini menjadi representasi penting dalam melihat bagaimana program nasional seperti PKH diterapkan di tingkat lokal.

Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga penerima manfaat tidak sepenuhnya mencerminkan kriteria miskin ekstrem atau sangat membutuhkan. Hal ini dapat terjadi akibat pendataan yang kurang akurat, pembaruan data yang lambat, atau mekanisme verifikasi yang belum optimal (Damayanti, 2021). Ketimpangan ini menimbulkan persoalan sosial baru di masyarakat, seperti kecemburuan sosial antarwarga dan berkurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah.

Selain hal tersebut, rendahnya pemahaman penerima manfaat terhadap prinsip bantuan bersyarat juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak

sedikit peserta PKH yang belum memahami bahwa bantuan ini mengharuskan mereka memenuhi komitmen tertentu, seperti menyekolahkan anak, memeriksakan kesehatan ibu hamil, balita, atau lansia, dan mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) (Kementerian Sosial RI, 2022). Kurangnya kesadaran ini menyebabkan bantuan diterima secara pasif, tanpa diiringi upaya untuk berubah atau menjadi mandiri.

Selain hal tersebut, dampak yang dihasilkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal tidak hanya terbatas pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat desa. Di Desa Jatirejo, misalnya, bantuan yang diterima KPM mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sehingga sebagian dana keluarga dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti modal usaha kecil atau perbaikan rumah. Program ini juga mendorong terjadinya perubahan perilaku, di mana orang tua lebih memperhatikan kehadiran anak di sekolah dan kesehatan anggota keluarga. Namun, di sisi lain, terdapat pula dampak sosial yang perlu diantisipasi, seperti munculnya kecemburuan sosial bagi warga yang tidak menerima bantuan serta ketergantungan pada bantuan tanpa upaya kemandirian.

Permasalahan lain adalah keterbatasan pendamping sosial yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Di banyak desa, jumlah pendamping tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat, sehingga proses pemantauan, edukasi, dan pendampingan tidak berjalan

secara optimal (Rahayu, 2020). Komunikasi antara pendamping, perangkat desa, dan masyarakat juga kerap menemui hambatan, baik karena kurangnya koordinasi, perbedaan pemahaman, maupun faktor geografis dan sosial.

Secara umum, daerah perdesaan seperti Desa Jatirejo berpotensi menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Beberapa di antaranya mencakup rendahnya partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, kurangnya pemahaman terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan bersyarat, serta keterbatasan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia, seperti jumlah pendamping sosial yang terbatas. Permasalahan-permasalahan tersebut sering menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan PKH, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kemandirian keluarga miskin (Suharto, 2019).

Sebagai bagian dari Kabupaten Jombang, Desa Jatirejo juga berada di bawah payung regulasi daerah seperti Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022, yang mengatur teknis pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten (Pemkab Jombang, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional telah diadopsi ke dalam kebijakan daerah, namun efektivitasnya di tingkat desa masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berbagai permasalahan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya di tingkat desa, menunjukkan perlunya evaluasi dan kajian akademik yang mendalam. Meskipun program ini secara

nasional telah terbukti memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, namun efektivitasnya di tingkat lokal sering kali belum tercapai secara optimal. Hal ini membuka ruang untuk penelitian yang tidak hanya mengevaluasi dampak program secara administratif, tetapi juga menelaah aspek sosial, perilaku, dan teknis pelaksanaan di lapangan. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji tentang bagaimana implementasi PKH berjalan di Desa Jatirejo dan sejauh mana program ini berdampak terhadap kesejahteraan keluarga miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang?
2. Apa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Desa Jatirejo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
2. Untuk menganalisis dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Desa Jatirejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial bersyarat seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Jombang dan pemerintah Desa Jatirejo, dalam memperbaiki pelaksanaan PKH agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga miskin.
- b. Bagi Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, mengenai pentingnya memenuhi kewajiban dalam program PKH serta memanfaatkan bantuan sebagai sarana menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
- c. Bagi Mahasiswa. Bagi peneliti maupun mahasiswa lainnya, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengembangkan

kemampuan akademik dalam meneliti isu-isu sosial yang kontekstual serta menjadi referensi dalam penyusunan karya ilmiah terkait kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat desa.

